

**UPAYA PEMERINTAH PROVINSI RIAU DALAM MEWUJUDKAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI PELAKSANAAN E-
GOVERNMENT TAHUN 2014)**

**Oleh :
Muhammad Jamal
Pembimbing : Drs. H. Isril MH**

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 -
Telp/Fax. 0761 – 63277

Abstrack

In organizing the obligatory functions of local governments decentralized in the field of information and communication given the responsibility to the Department of Communications and Information Technology (Diskominfo) Riau Province to implement. In undergoing this responsibility, Diskominfo Riau province are required to be able to take advantage of advances in information technology so that service to the public can be made more transparent and efficient as well as administrative activities of government can be run more easily and cheaply. Utilization of information technology in government agencies called the e -government. The purpose of this study was to determine the extent of implementation of e -government in the province of Riau Diskominfo and any factors that influence it.

This study uses the theory of decentralization by Rahardjo Adesasmitha who interpret Decentralization is the delegation of responsibility for policy administration, fiscal, and political from the Central Government to Local Government, which is where the organizing decentralization policy in the implementation of mandatory government affairs in the field of communication and information by Diskominfo Riau province needs to develop the concept of e -government should refer to the fourth structure architecture framework on Presidential Instruction No. 3 of 2003 on the National Strategy and Policy Development of E -Government. The fourth structure is access, portal of public services, the organization of information management, and infrastructure and basic applications.

The method used in this research is descriptive qualitative data analysis which through interviews and observations in the field are further analyzed to produce a conclusion. The informant from interviews conducted is of the Diskominfo Riau Province and related parties.

Based on the research that has been conducted against the efforts of the Government of Riau Province in realizing Public Disclosure (Study Implementation of E -Government 2014) shows that the implementation of e -government at Diskominfo Riau Province has not run with the maximum and Implementation fourth structure of the architecture framework on Presidential Instruction No. 3 Year 2003 has not been implemented fully because it is influenced by human resources as the main factor.

Keywords : Implementation, E-Government, Diskominfo Provinsi Riau

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Provinsi Riau lembaga yang bertanggung jawab dalam menjalankan urusan wajib pemerintah tersebut adalah Dinas Komunikas Informatika dan Pengolahan Data Elektronik (Diskominfo PDE) Provinsi Riau. Dalam menjalankan urusan wajib pemerintah daerah dalam bidang komunikasi dan informatika, Diskominfo PDE Provinsi Riau dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang terbuka dengan menyediakan pelayanan informasi yang transparan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan prinsip keterbukaan informasi publik secara cepat, murah dan tidak terhalang oleh jarak dan waktu. Maka dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintah perlu untuk diselenggarakan.

Penerapan teknologi informasi pada lembaga pemerintahan ini disebut dengan istilah *Electronic Government (E-Government)*. *E-Government* adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik maupun meningkatkan hubungan antar instansi pemerintah serta hubungan pemerintah dengan pihak bisnis (swasta). *E-Government* ini mewujudkan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanannya. Penerapan *E-Government* ini dimaksudkan agar pelayanan pemerintah dapat dengan mudah terjangkau oleh masyarakat dengan menghemat waktu dan biaya karena dengan pelayanan yang berbasis internet ini kegiatan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama masih ada jaringan internet yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 ayat (2) yaitu “Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar” meliputi Dalam setiap urusan wajib Pemerintah Daerah yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ini memiliki masing-masing instansi pemerintahan yang wajib mengurusnya. Dari 18 urusan Pemerintah Daerah Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang wajib diselenggarakan jelas terlihat bahwa salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang didesentralisasikan adalah komunikasi dan informatika, Maka dalam menyelenggarakan urusan wajib pemerintah daerah yang didesentralisasikan dalam bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Riau diberikan tanggung jawab kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau untuk melaksanakannya.

Penerapan Teknologi Informasi pada lembaga pemerintahan ini disebut dengan istilah *e-government (e-Gov)*. *E-Government* ialah pemafaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan public maupun meningkatkan hubungan antar instansi pemerintah serta hubungan pemerintah dengan pihak bisnis (swasta). *E-Government* ini mewujudkan Pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dalam proses administrasi dan pelayanannya. Penerapan *E-Government* ini dimaksudkan agar pelayanan pemerintah dapat dengan mudah terjangkau oleh masyarakat dengan menghemat waktu dan biaya karena dengan pelayanan yang berbasis internet ini kegiatan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja selama masih ada jaringan internet yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government bahwa pada dasarnya pemanfaatan teknologi Komunikasi dan Informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dimana dalam melaksanakan desentralisasi kebijakan ini oleh Provinsi Riau diintruksikan kepada Gubernur sebagai Kepala Daerah ditingkat Provinsi untuk melaksanakannya. Dalam kebijakan ini telah diatur sebuah kerangka arsitektur pengembangan *e-government* yang dimana dalam menerapkan *e-government* pada setiap instansi pemerintah harus mengacu pada kerangka arsitektur yang terdiri dari empat unsur, yaitu akses, portal pelayanan public, organisasi pengelolaan dan pengelolaan informasi. Serta infrastruktur dan aplikasi dasar. Keempat unsur ini wajib diimplementasikan karena sebagai unsur dasar dari diterapkannya sistem e-government pada suatu lembaga pemerintah.

Maka untuk meningkatkan pelayanan dari pemerintah kerakyat, pemerintah ke pemerintah maupun pelaku bisnis, Diskominfo dan PDE Provinsi Riau sebagai leading sector telah membentuk *e-office*, GSB (Government Service Bus) di Provinsi Riau. Melalui Government Service Bus, yaitu : e-Kepegawaian, e-Kuangan, e- Monev, e-LPSE, e-ULP, SDDKD, e-Profil Kesehatan, e-simpel, dan e-Planning. Dalam implementasinya, baru 8 (delapan) SKPD yang baru terbentuk, Kedelapannya adalah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Perpustakaan Arsip, dan Dokumen (BPAD), Dinas Pendidikan, Dinas Pendapatan daerah,

Dinas cipta karya, Tata ruang dan sumber Daya air, Dinas Bina Marga, RSUD Arifin Ahmad, dan diskominfo PDE (<http://mediacenter.riau.go.id>).

Sebagai mana yang kita tahu Web atau yang disering disebut *situs* merupakan untuk mengkomunikasikan apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh sebuah pemerintahan beserta pertanggung jawaban kepada rakyat yang diwakilinya. (Nico Andrianto, 2007 : 80-81). Melalui Situs resmi Pemerintah Provinsi Riau [Riau.go.id](http://riau.go.id), tepatnya di (<http://subdomain.riau.go.id/#>)

Subdomain SKPD Provinsi Riau melalui Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Riau terdapat alamat web dan email masing-masing Dinas, Badan, Biro dan lainnya. Namun, dalam daftar tersebut masih ada Dinas, Badan, Biro dan lainnya yang belum memiliki Web dan alamat email sendiri. Jika hal yang mendasar saja belum terwujud apalagi untuk sesuatu yang lebih besar. Oleh karena itu, ini membuktikan bahwa penerapan e-government di selingkungan Pemerintahan Provinsi Riau belum berjalan maksimal ditiap-tiap SKPD. Sehingga masyarakat tidak dapat memperoleh informasi secara cepat dan mudah yang seharusnya menjadi tujuan dari penerapan *e-government* ini.

Salah satu program yang dilakukan oleh direktorat e-government, Ditjen. Aptika – Kemkominfo RI yaitu Pemingkatan E-Government Indonesia. Dilihat dari situs resmi PEGI (<http://pegilayanan.go.id>), pemingkatan e-government tingkat provinsi tahun 2014 Provinsi Riau berada diperingkat 12 dari 22 Provinsi di Indoensia.

Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai Upaya Pemerintah Provinsi Riau Dalam

Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik judul penelitian yaitu **“Upaya Pemerintah Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pelaksanaan E-Government Tahun 2014)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang ingin dilihat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Upaya pemerintah daerah provinsi riau dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik ?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Upaya pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Upaya pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Upaya pemerintah daerah Provinsi Riau dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik..

1.4 Manfaat penelitian

1. Secara Teoritis

Untuk pengembangan konsep ilmu pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi informasi sebagai wujud dari *E-Government*.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan Pemerintah Provinsi Riau

hususnya pada Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Riau dalam penerapan *E-Government* dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan.

1.5 Tinjauan Pustaka

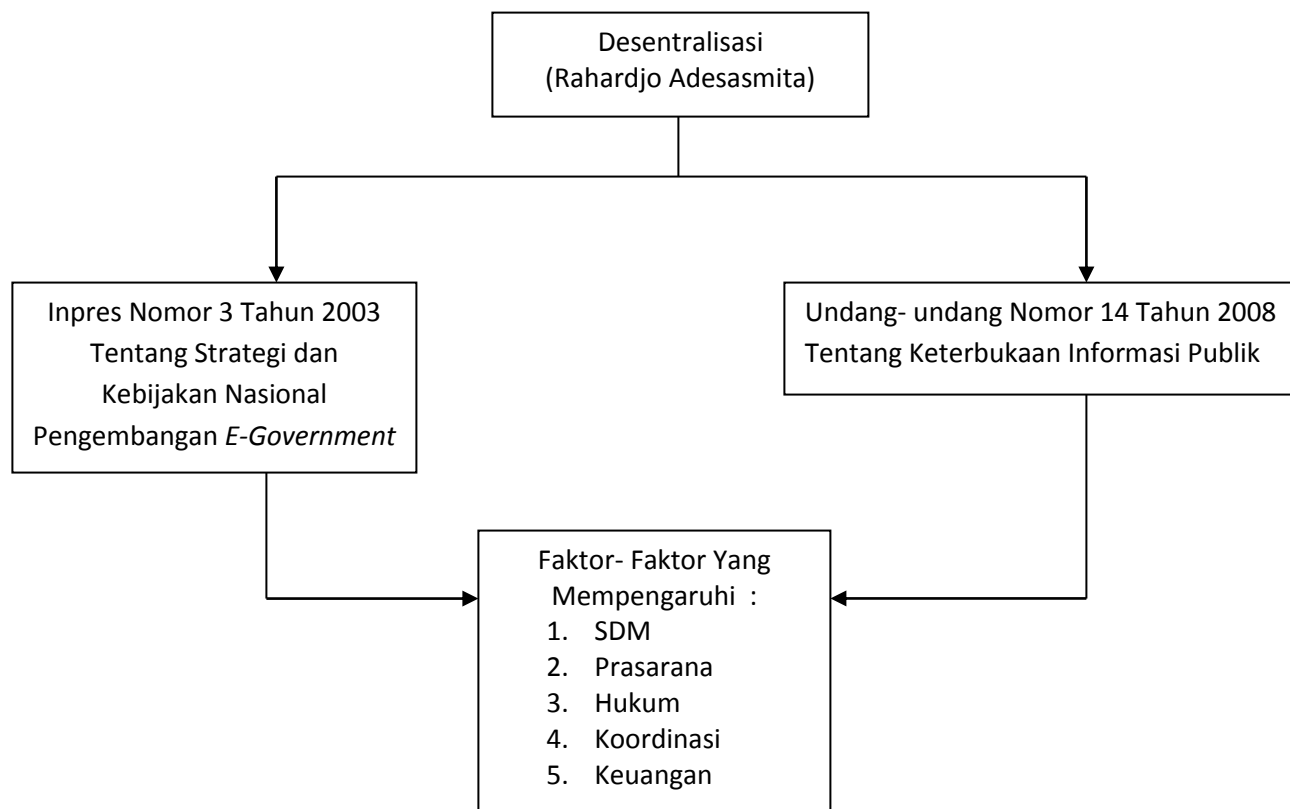
1.5.1 Dasar Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Menurut Rahardjo Adisasmita (2010 : 16) Desentralisasi adalah pelimpahan tanggung jawab administrasi kebijakan, fiskal, dan politik dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pelaksanaan desentralisasi merupakan upaya untuk mereformasi dan memodernisasi pemerintahan. Secara teoritis, desentralisasi dipahami sebagai penyerahan otoritas kewenangan dan fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dari Pemerintah nasional kepada Pemerintah sub-nasional.

Inpres Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-government bahwa pada dasarnya pemanfaatan teknologi Komunikasi dan Informasi dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, sebuah kerangka arsitektur pengembangan *e-government* yang dimana dalam menerapkan *e-government* pada setiap instansi pemerintah harus mengacu pada kerangka arsitektur yang terdiri dari empat unsur, yaitu akses, portal pelayanan public, organisasi pengelolaan dan pengelolaan informasi. Serta infrastruktur dan aplikasi dasar. Keempat unsur ini wajib diimplementasikan karena sebagai unsur dasar dari diterapkannya

sistem e-government pada suatu lembaga pemerintah.

1.5 Kerangka Berfikir Penelitian



1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Komunikasi Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Provinsi Riau karena sesuai dengan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Diskominfo Provinsi Riau yaitu pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika maka secara otomatis Diskominfo dituntut dalam menerapkan *e-government* dalam administrasi pemerintahannya maupun dalam pelayanan terhadap masyarakat.

Informan dalam penelitian ini adalah seseorang yang mengetahui mendalam tentang sejauh mana Pelaksanaan e-government pada Diskominfo Provinsi

Riau dan memberikan data serta keterangan atau informasi yang dibutuhkan.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara penulis dengan *key* informan yaitu Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Keamanan informatika, yang dimana mengurus tentang *e-government* pada Diskominfo Provinsi Riau dan informan pelengkap yaitu staff yang bekerja pada Diskominfo Provinsi Riau.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dengan informan, observasi ke lapangan, serta studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, menghimpun,

dan menganalisis dokumen-dokumen dalam penelitian tersebut.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif untuk pengolahan data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan, semua informasi yang dikumpulkan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

1.6 PEMBAHASAN

A. Upaya Pemerintah Provinsi Riau Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pelaksanaan *E-Government* Tahun 2014)

Pelaksanaan *e-government* pada suatu lembaga pemerintahan sama artinya dengan pergeseran paradigma birokratis menjadi paradigma *e-government* yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan fleksibilitas yang akhirnya mewujudkan kepuasan pengguna layanan publik. Dengan adanya perubahan paradigma ini sekaligus merubah infrastruktur maupun sarana prasarana yang digunakan dalam pekerjaannya. Pada awalnya dalam sistem birokrasi, kegiatan administrasi dilaksanakan dengan manual sehingga berakibat kepada kinerja yang tidak efektif dan efisien karena harus menggunakan lebih banyak waktu dan tenaga. Begitu pula dengan sistem pelayanan publiknya yang dimana masyarakat harus lebih agresif dalam mencari informasi dalam artian masyarakat yang membutuhkan informasi harus mendatangi lembaga pemerintah yang menyediakan informasi yang dibutuhkannya, sehingga proses pelayanan terhadap masyarakat sulit untuk dijangkau masyarakat. Sedangkan dengan merubah paradigma birokratis ke

paradigma *e-government* ini, pemerintah dapat melaksanakan kegiatan administrasi maupun pelayanan kepada masyarakat dengan berbasis teknologi.

Dalam pelaksanaannya *e-government* secara otomatis menerapkan sistem-sistem yang berbasis teknologi informasi yang dapat memberikan kemudahan dalam setiap kegiatan administrasi pemerintah maupun pelayanan terhadap masyarakat. Sistem yang berbasis teknologi ini baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah selain meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat juga meningkatkan hubungan antar instansi pemerintah maupun pemerintah dengan pihak lain (swasta). Pemanfaatan portal pelayanan publik membutuhkan media berupa koneksi internet (akses) untuk para *stakeholder*. Portal pelayanan publik tentunya mempunyai organisasi yang mengatur atau mengurusnya dan juga infrastruktur sebagai alat penunjang pelayanan secara elektronik baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat lunak yang dimaksud disini ialah seperti aplikasi-aplikasi dasar yang diterapkan dan dimanfaatkan dalam penyediaan informasi kepada publik.

Dari keempat struktur kerangka arsitektur tersebut mempunyai sasaran yang dituju dalam strategi pengembangan *e-government* sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003. Hal inilah yang menjadi indikator penulis dalam penerapan keempat struktur kerangka arsitektur tersebut.

Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah negara pada tingkat harga yang terjangkau oleh masyarakat, dengan sejauh mungkin melibatkan partisipasi dunia usaha merupakan sasaran dari diterapkannya akses internet

sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2003, hal ini telah mulai terwujud dengan telah bekerjasamanya Diskominfo Provinsi Riau dengan pihak PT.Telkom Indonesia dalam penyediaan akses untuk masyarakat maupun bagi aparatur pemerintah, serta telah Jaringan Fiber Optic, Jaringan Wireless dan Wire/UTP telah terhubung di 43 SKPD Pemerintah Provinsi Riau meskipun belum semua SKPD yang terhubung namun hal ini masih terus dikembangkan. Hal ini terlihat dari pengembangan dan penambahan tempat akses yang dilakukan Diskominfo Provinsi Riau di beberapa titik area lainnya yang menjadi rencana Diskominfo Provinsi Riau pada tahun 2016 ini.

Pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah terkait, sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan kewenangan di lingkungan pemerintah, diantaranya dalam Pembuatan situs-situs resmi antar organisasi pemerintah di Provinsi Riau, sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan tentang kewajiban instansi pemerintah dan pemerintah otonom untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik secara on-line. Sasaran ini belum sepenuhnya terpenuhi karena Masih adanya SKPD dilingkungan Provinsi Riau masih belum memiliki website resmi antar SKPD diprovinsi Riau. Dalam implementasi portal pelayanan publik berupa website resmi SKPD dilingkungan Provinsi Riau masih dirasakan kurang maksimal karena pada penyediaan informasi serta belum terciptanya komunikasi dua arah antar pemerintah dengan masyarakat yang dapat dilihat dari kurang responsifnya aparatur pemerintah dalam menanggapi

pertanyaan dari masyarakat, selain itu cara yang dilakukan dianggap tidak efisien dan tidak memberikan keterbukaan informasi terhadap masyarakat yang mempunyai pertanyaan yang sama.

B. Pemeringkatan *E-Government* Indonesia

Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) untuk tingkat Provinsi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat *e-Government*, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang melibatkan seluruh kabupaten/kota di Republik Indonesia. Kegiatan PeGI dilakukan untuk melihat peta kondisi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di tingkat Provinsi se-Indonesia.

Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) mempunyai tiga tujuan utama, yaitu:

1. Memberikan acuan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah.
2. Mendorong peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan obyektif.
3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

Dalam kegiatan PeGI, telah ditetapkan lima dimensi yang akan dikaji, yaitu: kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, dan perencanaan. Masing-masing dimensi memiliki bobot yang sama dalam penilaian karena semuanya dianggap penting, saling terkait, dan saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

1. Kebijakan

Hasil asesmen pada tabel Pemeringkatan E-government Indonesia tahun 2014 untuk dimensi Kebijakan Provinsi Riau menunjukkan hasil yang Kurang. Visi Provinsi Riau adalah **“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”**. Sedangkan misi yang diemban ada Sembilan, yaitu:

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
4. Menurunkan Kemiskinan
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan
8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata
9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan

Meski TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) belum disebutkan dalam visi dan misi, namun perlu disadari bahwa TIK dapat berperan terutama untuk misi pertama untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sistem informasi geografis, dan di misi ke sembilan yaitu meningkatkan Peran swasta dalam

pembangunan sebagai alat bantu peran swasta dalam pembangunan *LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)*. Ketika peran TIK mulai disadari dan mulai dimasukkan dalam program-program pembangunan, maka kontribusi TIK akan mulai terlihat. Untuk saat ini, peran TIK dimasukkan dalam RPJMD maupun RPJP.

Kebijakan terkait TIK yang pernah dikeluarkan dalam bentuk Keputusan/Peraturan Gubernur adalah:

- Peraturan Daerah Provinsi Riau Tentang Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan (2015)
- Pembentukan Tim Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi dan Keterbukaan Provinsi Riau (2016)
- Pembentukan Rencana Induk Pengembangan E-Government Provinsi Riau (2014)
- Pembentukan Standar Pelayanan E-Office Dan Email (2013)
- Surat Edaran No 555/DISKOMINFO & PDE/34.14 Tentang Penggunaan Email, Pengisian Data Kegiatan SKPD dan Penggunaan IP PHONE dan Internet di Pemerintah Provinsi Riau (2013)
- Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 800/BKP2D/5.1/VIII/2015/02.17 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendataan Ulang PNS Secara Elektronik (e-PUPNS) di Lingkungan Pemprov Riau Tahun (2015)
- Keputusan Gubenur Nomor 909/VIII/2011 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola

Informasi dan Dokumentasi Daerah Provinsi Riau (2011)

- Surat Edaran no. 555/Diskominfo & PDE/90.21 tentang pelaksanaan e-government di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (2014)

2. KELEMBAGAN

Hasil asesmen dimensi Kelembagaan menunjukkan hasil BAIK. Provinsi Riau sudah memiliki lembaga pengelola TIK yang independen, yaitu Dinas Kominfo Provinsi Riau yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau. Adapun tupoksi Dinas Kominfo diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau. Dengan demikian, secara kelembagaan dan tupoksi, Provinsi Riau telah memiliki satu lembaga yang seharusnya cukup memadai untuk menangani pengelolaan TIK. Mengenai Sistem dan Prosedur yang lengkap dan terdokumentasi sedang dalam rancangan pembuatannya yaitu dalam tahap Pembentukan Tim Penyusunan Prosedur Operasi Standar (Standard Operating Procedure) Manajemen Sistem Informasi Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi. Adapun SOP yang sudah dibuat yaitu Standar Operasional Prosedur Pengunjung di Media Center terkait meningkatkan kualitas SDM dalam pemanfaatan TIK.

Kekurangan SDM diatasi dengan perekrutan tenaga IT oleh Diskominfo Provinsi Riau dengan latar belakang IT, dalam tahap perekrutan ini sebanyak 80 orang akan diterima dan didistribusikan ke tiap-tiap SKPD nantinya. Daerah ini

perlu melakukan inventarisasi pengetahuan dan keterampilan agar dapat menyusun program peningkatan SDM untuk mengurangi ketergantungan pada SDM pihak ketiga.

3. INFRASTRUKTUR

Hasil asesmen dimensi Infrastruktur menunjukkan hasil KURANG. Minimnya fasilitas data center di Provinsi Riau menjadi pertimbangan dalam rencana pengembangan TIK kedepan. Pembangunan data center dapat menjadi salah satu agenda pengembangan TIK yang dilakukan secara bertahap, agar data yang tersebar dapat dikonsolidasikan sesuai prioritas dan ketersediaan anggaran.

Arah pengembangan infrastruktur TIK yang dinilai mampu memenuhi sasaran tersebut diarahkan pada:

1. Pengelolaan infrastruktur terpusat (konsolidasi infrasturktur) terkait:
 - WAN
 - Data center
 - Help desk
2. Konsolidasi pengelolaan WAN untuk meningkatkan layanan dan menghemat biaya keseluruhan terkait konektivitas dan kualitas layanan.
3. Penggunaan teknologi terbuka yang mudah diintegrasikan.
4. Modularisasi dalam pengembangan.

Provinsi Riau juga belum memikirkan fasilitas DRC (Disaster Recovery Center) dengan memanfaatkan fasilitas backup data. Pada dasarnya Sebuah DRC (*Disaster Recovery Center*) adalah sebuah *Remote Data Center* yang memiliki fungsi-fungsi *Data Center* sebagaimana mestinya, dan siap untuk menggantikan

fungsi dari *Data Center* sesegera mungkin jika terjadi disaster (bencana alam). Untuk itu sebuah DRC harus memiliki standar desain yang baik.

Perancangan DRC harus didasari suatu kegiatan *Risk Assessment* dan *Business Impact Analysis* (BIA) yang merupakan bagian dari kegiatan penyusunan BCP sebagai bagian dari penyusunan *Disaster recovery plan* (DRP). *DRP* adalah suatu proses terdokumentasi atau suatu kumpulan prosedur untuk memulihkan dan melindungi suatu infrastruktur TIK dari infrastruktur bisnis bilamana terjadi bencana. Rencana ini harus didokumentasikan, dan menyatakan prosedur-prosedur yang harus diikuti bilamana terjadi bencana. Untuk saat ini Pemerintah Provinsi Riau masih terus mengupayakan penginventarisasian dan pemeliharaan terhadap infrastruktur yang telah ada dengan cara memperbaiki infrastruktur yang bisa langsung diperbaiki dan mengalokasikan dana untuk infrastruktur berupa pergantian alat-alat yang membutuhkan dana yang banyak. Pengembangan infrastruktur ini disarankan melalui upaya perbaikan seperti Pemeliharaan TIK dilakukan dengan lebih terencana dan rutin (tidak

lagi bersifat ad-hoc ketika terdapat perangkat yang rusak). Saat ini pemeliharaan TIK juga dilakukan secara terpisah oleh masing-masing SKPD dan Perlu disusun kebijakan keamanan informasi.

4. APLIKASI

Hasil dari asesmen Aplikasi terlihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel Daftar Aplikasi Berdasarkan
Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau**

| No | Aplikasi yang mempunyai Fungsi | Daftar Aplikasi Status (keaktifan: aktif/pasif) | Kelengkapan Dokumentasi |
|----|--------------------------------|--|---|
| 1 | Pelayanan Publik | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sddkd (sistem database dukungan kebijakan daerah)</i> - <i>Lapor (layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat)</i> - <i>Data penerimaan realtime PKB,BBN-KB dan SWDKLLJ Provinsi riau</i> - <i>KIM (Kelompok informasi Masyarakat)</i> - <i>Layanan Perizinan</i> - <i>GSB (Government Servis Bus)</i> - <i>LPSE (Layanan pengadaan secara eektrtonik</i> - <i>Laporan kerusakan jalan</i> - <i>Info pajak kendaraan</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Belum - Sudah - Sudah - Sudah - sudah |
| 2 | Administrasi& Manajemen Umum | <ul style="list-style-type: none"> - <i>e-absen</i> - <i>e-office</i> | <ul style="list-style-type: none"> - sudah - sudah |
| 3 | Administrasi legislasi | <ul style="list-style-type: none"> - <i>produk hokum</i> - <i>jdih (jaringan dokumentasi dan informasi hukum)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - sudah - sudah |
| 4 | Manajemen Pembangunan | <ul style="list-style-type: none"> - <i>e-planning</i> - <i>monev (monitoring dan evaluasi APBD dan APBN)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - belum - sudah |
| 5 | Manajemen Keuangan | <ul style="list-style-type: none"> - <i>e-keuangan</i> - <i>sipkd (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - sudah - sudah |
| 6 | Manajemen Kepegawaian | <ul style="list-style-type: none"> - <i>simpeg (sistem informasi kepegawaian)</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Sudah |

Sumber : www.riau.go.id

5. PERENCANAAN

Berdasarkan Indikator-indikator yang dimaksud dalam dimensi Perencanaan tersebut, indikator dari dimensi perencanaan ini seperti sudah adanya organisasi yang melakukan

perencanaan TIK, dan sudah adanya sistem perencanaan untuk pengembangan dan pemanfaatan TIK yang dilakukan secara nyata. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah Provinsi Riau Selaku Diskominfo Provinsi Riau sudah memenuhi beberapa dari indikator dari pelaksanaan Pemeringkatan E-governement ini.

Mengenai indikator Adanya dokumentasi Master Plan yang lengkap, yang mengandung unsur lima dimensi PeGI, Implementasi dari Master Plan yang sudah dibuat, serta adanya anggaran yang tertuang dalam RPJMN/RPJMD dan RKP/RKPD, dapat dilihat bahwa komitmen Provinsi Riau untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sudah mencapai pada titik pelaksanaan, dengan perencanaan yang sudah siap. Provinsi Riau dalam Peningkatan E-government di tahun 2014, dalam dimensi perencanaan ini poin 1.95 dan masih termasuk dalam kategori kurang, dapat terlihat sudah adanya evaluasi terhadap peningkatan *e-government* dari tahun 2014, dimana pada tahun 2014 Master Plan TIK belum ada dan ditahun 2016 ini Diskominfo Provinsi Riau sudah mewujudkannya. Disini dapat dilihat keseriusan pemerintah Provinsi Riau dalam mengupayakan Pemerintahan berbasis keterbukaan ini dibuktikan dengan sudah adanya progress yang dilakukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan *e-government* pada Diskominfo Provinsi Riau terdiri dari prasarana, hukum, koordinasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang dimana sumber daya manusia merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penerapan *e-government* pada Diskominfo Provinsi Riau. Dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam memanfaatkan prasarana dan aplikasi yang telah ada akan mengakibatkan pelaksanaan *e-government* pada Diskominfo Provinsi Riau berjalan setengah-setengah.

1.7 PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Upaya mewujudkan *e-government* pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan *e-government* pada Diskominfo Provinsi Riau belum berjalan dengan maksimal dan pengimplementasian keempat struktur dari kerangka arsitektur pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 belum dilaksanakan dengan menyeluruh. Karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya dan harus dipenuhi, seperti Prasarana, Hukum, Koordinasi, Keuangan dan Sumber Daya Manusia.
2. Pelaksanaan *e-government* pada Diskominfo Provinsi Riau dilihat dari Peningkatan *e-government* Indonesia dengan lima dimensi yang menjadi tolak ukur Penerapan *e-government* tersebut, yaitu Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi dan Perencanaan. Dari kelima dimensi tersebut memiliki beberapa indikator untuk mendapatkan penilaian yang bagus. Di tahun 2014, Provinsi Riau sudah mengikuti Program dari Direktorat *e-government*, Ditjen Aptika – Kemkominfo RI dan hasilnya dari kelima dimensi tersebut Cuma satu dimensi yang masuk dalam kategori Baik yaitu Dimensi Kelembagaan. Namun, seiring berjalannya waktu Provinsi Riau khususnya

Diskominfo telah melakukan evaluasi-evaluasi dari beberapa dimensi tersebut dan telah memenuhi beberapa dari indikator-indikator yang telah diberikan tersebut. Namun, masih ada juga beberapa dimensi dan indikatornya yang belum berjalan maksimal. Karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya dan harus dipenuhi, seperti Prasarana, Hukum, Koordinasi, Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Akadun., (2009). *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Andranto, Nico., (2007). *Good E-Government: Transpaarransi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Malang: Bbayu Media.
- Departemen Dalam Negeri., (2007). *Buku Pedoman "Grand Strategy Implementasi Otonomi Daerah"*.
- Djunaedi, Achmad (2002). *Beberapa Pemikiran E-Government dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia*.
- Indrajit, Richardus Eko., (2005). *E-Goeverbment in action*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Indrajit, Richardus Eko., (2006). *Elctronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Kumorotomo, W . (2004). *Kegagalan Penerapan E-Goevernment dan Kegiatan Tidak Produktif dengan Internet*. Yogyakarta: Gama Press.
- Muluk, M.R.K., (2007). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Agritek Streers.
- Nugroho, Riant., (2004). *Kebijakan Publik formulasi, implementasi, dan evaluasi*. PT. Elek Media Komputindo: Jakarta.
- Purwanto. Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti., (2012). *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Suaedi, Falih, dan Bintoro Wardiyanto., (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara Revormasi Birokrasi dan e-Government*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sugyono, Hetifah Sj., (2009). *Inovasi, Partisipasi dan Good Government*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Wicaksono. Kristian Widya., (2006). *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wirjosoegito, Soenobo., (2014). *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Andrianto,Nico.(2007) .Good e-Governance:Transparansi dan

Akuntabilitas Publik Melalui e-Government, Malang: Banyumedia.

Dwiyanto, Agus, (2011).
Mengembalikan kepercayaan Publik
Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta. PT.
Gramedia Pustaka Utama.

Sumber lain :

- Surat Edaran Pelaksanaan E-Government di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- Master Plan TIK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Riau
- Diskominfo Provinsi Riau.,
<http://www.diskominfo.go.id>
- Website Resmi Pemerintah Provinsi Riau.,
<http://www.riau.go.id>
- Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Nasional Pengembangan *E-Government*
- Kementerian Komunikasi dan Informatika.,
<http://www.kominfo.go.id>
- Data Pembangunan Provinsi Riau Tahun 2015
- Metode Pemeringkatan E-Government Indonesia (Pegi) Untuk Audit Tata Kelola Teknologi Informasi
- Laporan Realisasi Program Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2015 Diskominfo Provinsi Riau